



**KEPALA DESA SOJOMERTO
KECAMATAN GEMUH KABUPATEN KENDAL**

**PERATURAN KEPALA DESA SOJOMERTO
NOMOR 1 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DD)
TAHUN ANGGARAN 2022**

**Ditetapkan :
HARI SELASA , 11 JANUARI 2022**

**DESA SOJOMERTO
KECAMATAN GEMUH KABUPATEN KENDAL**

Alamat : Jl. Napak Tilas KM 7 Desa Sojomerto
Email : pemdessojomerto2013@gmail.com Kode Pos 51356



KEPALA DESA SOJOMERTO
KECAMATAN GEMUH KABUPATEN KENDAL

PERATURAN KEPALA DESA SOJOMERTO
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DD) TAHUN ANGGARAN 2022
DI DESA SOJOMERTO KECAMATAN GEMUH KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SOJOMERTO,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 pada Pasal 5 ayat (4a) tentang Penggunaan Dana Desa untuk Program Perlindungan Sosial berupa Bantuan Langsung Tunai Desa paling Sedikit 40 % (Empat Puluh Persen);
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa pada pasal 32 ayat (1a) tentang Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa untuk Program Perlindungan Sosial berupa BLT Desa;

- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 11 Januari 2022 tentang Musyawarah Desa Khusus Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahun Anggaran 2022 Desa Sojomerto Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahun Anggaran 2022 Desa Sojomerto Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
31. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
32. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
33. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
34. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No 359);

35. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
36. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
37. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
38. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
39. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
40. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);

41. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);
42. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Tranfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1289);
43. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
44. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
45. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 6);
46. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2016-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 2);

47. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2017 Nomor 10 Seri A Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal nomor 161);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 83 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 83 Seri A Nomor);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 2);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 20);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
52. Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Bupati Kendal Kepada Camat dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 26 Seri E Nomor 15);

53. Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 26 Seri E Nomor 15);
54. Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 3 Seri E Nomor 3);
55. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
56. Peraturan Bupati Kendal Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan yang Didanai dari Dana Desa Tahun Anggaran 2016 di Kabupaten Kendal (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 31 Seri E Nomor 27);
57. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E Nomor 41);
58. Peraturan Bupati Kendal Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standarisasi Biaya dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 72 Seri E Nomor 45);

59. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 Seri E);
60. Bupati Kendal Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 30);
61. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 79 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 No 80);
62. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kegiatan Pembangunan dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 38);
63. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 2);
64. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 13);

65. Peraturan Bupati Kendal Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 31);
66. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
67. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 No 81);
68. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 13);
69. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
70. Peraturan Bupati Kendal Nomor 69 Tahun 2020 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020 (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 69);
71. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2020 tentang Standarisasi Biaya Tahun Anggaran 2021 di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 No 80);

72. Peraturan Bupati Kendal Nomor 96 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 No 96);
73. Peraturan Bupati Kendal Nomer 74 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 74);
74. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 4);
75. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standarisasi Biaya dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 9);
76. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 No 17);
77. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain – Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 26);
78. Peraturan Bupati Kendal Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 85 Tahun 2020 tentang Analisa Harga satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 43);

79. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 53);
80. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Kabupaten Kendal Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 62);
81. Peraturan Desa Sojomerto Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Sojomerto Tahun 2017-2022 (Lembaran Desa Sojomerto Tahun 2017 Nomor 5);
82. Peraturan Desa Sojomerto Nomor 05 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Sojomerto (Lembaran Desa Sojomerto Tahun 2018 Nomor 05);
83. Peraturan Desa Sojomerto Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Sojomerto Kecamatan Gemuh (Lembaran Desa Sojomerto Tahun 2019 Nomor 02).
84. Peraturan Desa Sojomerto Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sojomerto Tahun 2022 (Lembaran Desa Sojomerto Tahun 2021 Nomor 4);
85. Peraturan Desa Sojomerto Nomor 06 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Sojomerto Nomor 06);
86. Peraturan Kepala Desa Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sojomerto Tahun 2022 (Berita Desa Sojomerto Tahun 2021 Nomor 05);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DD) TAHUN ANGGARAN 2022 DI DESA SOJOMERTO KECAMATAN GEMUH KABUPATEN KENDAL.

KESATU : Menetapkan Daftar Nama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

KEDUA : Sasaran Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) berdasarkan kriteria ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 pasal 33, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:

1. Keluarga Miskin atau tidak mampu yang berdomisili didesa bersangkutan dan diprioritaskan untuk Keluarga yang termasuk dalam kategori Kemiskinan Ekstrem;
2. Keluarga Miskin yang kehilangan Mata Pencaharian;
3. Keluarga Miskin yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
4. Keluarga Miskin Penerima Jaring Pengaman Sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan / atau dari APBN.
5. Keluarga Miskin yang terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan belum menerima bantuan; atau
6. Rumah Tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

KETIGA : Jangka waktu dan besaran penerimaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sebagai berikut:

- a. Besaran BLT-DD setiap bulan sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga; dan

b. Masa penyaluran BLT-DD diberikan setiap bulan selama 12 (Dua Belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari 2022.

KEEMPAT : Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode nontunai (*cashless*) setiap bulan melalui Bank Pemerintah.

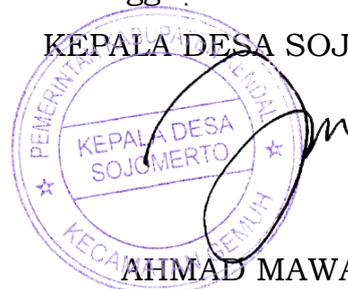
KELIMA : Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkan Peraturan kepala Desa ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022 Desa Sojomerto Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal

KEENAM : Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sojomerto.

Ditetapkan di : Desa Sojomerto

Pada tanggal : 11 Januari 2022

KEPALA DESA SOJOMERTO



AHMAD MAWARDI

BERITA DESA SOJOMERTO TAHUN 2022 NOMOR 1

LAMPIRAN : Peraturan Kepala Desa Sojomerto
Nomor : 1 Tahun 2022
Tanggal : 11 Januari 2022
Tentang : Penetapan Keluarga Penerima
Manfaat (KPM) Bantuan
Langsung Tunai Dana Desa (BLT
DD) Tahun Anggaran 2022

DAFTAR NAMA
KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DD)
TAHUN ANGGARAN 2022
DESA SOJOMERTO
KECAMATAN GEMUH KABUPATEN KENDAL

NO	NIK	NAMA	ALAMAT
1	3324 [REDACTED] 001	MAHFUD SAIFUDIN	Sojomerto, [REDACTED]
2	3324 [REDACTED] 001	SITI PAIDAH	Sojomerto, [REDACTED]
3	3324 [REDACTED] 002	ROKHIMIN	Sojomerto, [REDACTED]
4	3324 [REDACTED] 004	MUGI ROMDON AKHIROH	Sojomerto, [REDACTED]
5	3324 [REDACTED] 002	ELISA ARIYANTO SALIM	Sojomerto, [REDACTED]
6	3324 [REDACTED] 002	ARIF ISMOKO	Sojomerto, [REDACTED]
7	3521 [REDACTED] 002	SUHERI	Sojomerto, [REDACTED]
8	3324 [REDACTED] 002	FRESTIANI	Sojomerto, [REDACTED]
9	3324 [REDACTED] 002	MUS MUJIONO	Sojomerto, [REDACTED]
10	3324 [REDACTED] 001	BUNJARI	Sojomerto, [REDACTED]
11	3324 [REDACTED] 001	SITI FATOYAH	Sojomerto, [REDACTED]
12	3324 [REDACTED] 002	PUJIAH	Sojomerto, [REDACTED]
13	3324 [REDACTED] 001	SITI ROBAEAH	Sojomerto, [REDACTED]
14	3324 [REDACTED] 001	SITI DEWI MASITOH	Sojomerto, [REDACTED]
15	3324 [REDACTED] 001	KHOLILI	Sojomerto, [REDACTED]
16	3324 [REDACTED] 001	IMAM SADHELI	Sojomerto, [REDACTED]
17	3324 [REDACTED] 006	ENDANG PURWANINGSIH	Sojomerto, [REDACTED]
18	3324 [REDACTED] 001	NUR ALI	Sojomerto, [REDACTED]
19	3324 [REDACTED] 002	AHMAD JAZURI	Sojomerto, [REDACTED]
20	3324 [REDACTED] 001	SAK'IMAH	Sojomerto, [REDACTED]

NO	NIK	NAMA	ALAMAT	
21	3324	003	AKHMAD MUKLIS	Sojomerto,
22	3324	002	KUMINI	Sojomerto,
23	3324	003	SOLAWATIK	Sojomerto,
24	3324	002	SOLEKHAH	Sojomerto,
25	3324	005	ABDUL ROHMAN	Sojomerto,
26	3324	002	BUNJARI	Sojomerto,
27	3324	001	ISMAWATI	Sojomerto,
28	3324	002	MUNADLIRIN	Sojomerto,
29	3324	001	SOLIKIN	Sojomerto,
30	3324	001	SULASTRI	Sojomerto,
31	3324	003	NUR HIDAYATI	Sojomerto,
32	3324	001	KUSPUJI MULYARSIH	Sojomerto,
33	2171	003	WARTI	Sojomerto,
34	3324	001	SITI ROMAYATUN	Sojomerto,
35	3324	002	MARYAM	Sojomerto,
36	3324	002	PARTINAH	Sojomerto,
37	3324	003	SUTRIYAH	Sojomerto,
38	3324	001	LESTARI	Sojomerto,
39	3324	002	YULINAR	Sojomerto,
40	3324	002	SUMILAH	Sojomerto,
41	3324	001	SUKITO	Sojomerto,
42	3324	001	SITI LESTARI	Sojomerto,
43	3327	009	ABDUL KHARIS BANDANIZI	Sojomerto,
44	3324	003	SITI MARIFAH	Sojomerto,
45	3324	001	ANIYATUN	Sojomerto,
46	3324	002	UMI MUSTAGHFIROH	Sojomerto,
47	3324	002	EKO PUTRO NUR RAMA	Sojomerto,
48	3324	004	SUPARTINI	Sojomerto,
49	3324	002	KEMI	Sojomerto,
50	3324	002	RUKAENI	Sojomerto,

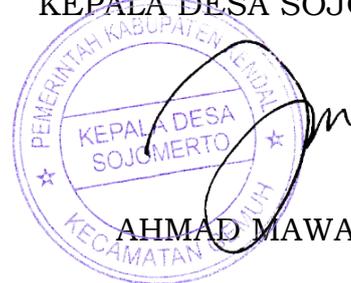
NO	NIK	NAMA	ALAMAT	
51	3324	001	SITI ISMIATUN	Sojomerto,
52	3324	002	SRI SUHARSI	Sojomerto,
53	3324	001	SUMIATI	Sojomerto,
54	3324	002	SITI FAIZATUN	Sojomerto,
55	3324	001	NUR KHAMIDAH	Sojomerto,
56	3324	001	MAFTAKHATUL AKHIROH	Sojomerto,
57	3324	002	SETYA SISWANINGSIH	Sojomerto,
58	3324	002	SRI WIDAYATI	Sojomerto,
59	3324	002	SULASTRI	Sojomerto,
60	3324	003	SUNARDI	Sojomerto,
61	3324	001	JUMADI	Sojomerto,
62	3324	002	DURROTUN NAFISAH	Sojomerto,
63	3324	003	SITI AISAH	Sojomerto,
64	3173	010	M. KABUL BUDIHARTO	Sojomerto,
65	3324	001	KAMBALI	Sojomerto,
66	3324	001	MIPROYATI	Sojomerto,
67	3324	001	KASTIK	Sojomerto,
68	3324	001	MONAH	Sojomerto,
69	3324	001	MUSRIYATI	Sojomerto,
70	3324	002	JAMIATI	Sojomerto,
71	3324	002	WAHYUNI	Sojomerto,
72	3324	002	KOMSATUN	Sojomerto,
73	3324	003	AYATI	Sojomerto,
74	3324	002	PURWANTO	Sojomerto,
75	3324	001	MULYONO	Sojomerto,
76	3324	004	MIRSAMUN	Sojomerto,
77	3324	004	KHOIRUL ANAS	Sojomerto,
78	3324	003	FAHRUR ANAS	Sojomerto,
79	3324	003	SUGIYANTO	Sojomerto,
80	3324	001	SAPAWI	Sojomerto,

NO	NIK	NAMA	ALAMAT
81	3324	001 BAROZA	Sojomerto,
82	3325	002 SUNIYATI	Sojomerto,
83	3324	001 AHMAD ASYIFIN	Sojomerto,
84	3324	006 SUAWIYAH	Sojomerto,
85	3324	002 SHOLAWATI	Sojomerto,
86	3324	001 SITI JUMIATUN	Sojomerto,
87	3324	004 KUYAERI	Sojomerto,
88	6208	002 BUDIYANTO	Sojomerto,
89	3324	002 ACHMAD SAEFUL	Sojomerto,
90	3324	001 NASIRIN	Sojomerto,
91	3324	003 MUNADIRIN	Sojomerto,
92	3324	001 AHMADUN	Sojomerto,
93	3327	000 KHOLKIYAH	Sojomerto,
94	3324	003 WASIBUN	Sojomerto,
95	3324	002 KHOIRUL ROKHMAN	Sojomerto,
96	3324	001 MOHADI	Sojomerto,
97	3324	004 SUSWIYATI	Sojomerto,
98	3324	001 RINI	Sojomerto,
99	3324	002 ACHMAD FAUZAN	Sojomerto,
100	3324	003 SUTRISNO	Sojomerto,
101	3324	001 SLAMET SUGIYANTO	Sojomerto,
102	3324	001 SUSIYANTO	Sojomerto,
103	3324	001 SITI PATONAH	Sojomerto,
104	3324	003 TRIMO	Sojomerto,
105	3324	001 ANY SETIOWATI	Sojomerto,
106	3324	001 SUGIRI	Sojomerto,
107	3324	001 SUNADI	Sojomerto,
108	3324	001 ROKIMIN	Sojomerto,
109	3324	002 KASIYANTO	Sojomerto,
110	3324	001 SUBIYANTO	Sojomerto,

NO	NIK	NAMA	ALAMAT
111	3324	003 IDA FITRIANA	Sojomerto,
112	3324	002 SUSILOWATI	Sojomerto,
113	3324	003 TRI WULANSARI	Sojomerto,
114	3324	001 RINO FIUTONO	Sojomerto,
115	3324	002 SUROSO	Sojomerto,
116	3324	001 RENI	Sojomerto,
117	3324	002 MURODI MIFTAKHUDIN	Sojomerto,
118	3203	002 KAMISAH	Sojomerto,
119	3324	001 KOMSIYAH	Sojomerto,
120	3324	001 UMI MASIKAH	Sojomerto,
121	3324	002 ASRORI	Sojomerto,
122	3326	001 IPROYAH	Sojomerto,
123	3324	002 SUBANDRIYO	Sojomerto,
124	3324	001 MUH. MUNDAKIR KABIB	Sojomerto,
125	3324	002 SOLIKAH	Sojomerto,
126	3324	001 ITA EVIANA	Sojomerto,
127	3324	003 KISWATI	Sojomerto,
128	3324	001 AHMAD SUBEKAN	Sojomerto,
129	3324	002 ABDUL MUBIN	Sojomerto,
130	3324	001 AHMAD BAROYA	Sojomerto,
131	3324	001 SLAMET	Sojomerto,
132	3324	001 NUR JAYILAH	Sojomerto,
133	3324	002 TRI NUR AENI	Sojomerto,
134	3324	001 ACHMAD SUDONO	Sojomerto,
135	3324	003 MUROKATUL ULFA	Sojomerto,
136	3324	002 SUSIANTI	Sojomerto,
137	3506	004 INDAH PURWATI	Sojomerto,
138	3324	002 IBADI	Sojomerto,
139	3324	001 MUNAWAR	Sojomerto,
140	3324	001 TOHARI	Sojomerto,

NO	NIK		NAMA	ALAMAT
141	332	01	MULYANTO	Sojomerto,
142	332	01	KAMIATI	Sojomerto,
143	332	01	PARIYAH	Sojomerto,
144	332	01	SUNARDI	Sojomerto,
145	332	02	BAKRI	Sojomerto,
146	332	01	AHMAD SOKHIB	Sojomerto,
147	332	01	SUKO	Sojomerto,

KEPALA DESA SOJOMERTO



AHMAD MAWARDI